



BUDAYA POLITIK JAWA TENGAH



BADAN KESBANGPOL DAN LIMNAS
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015



BUDAYA POLITIK JAWA TENGAH



BADAN KESBANGPOL DAN LIMNAS
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015

BUDAYA POLITIK JAWA TENGAH

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Penulis: DR. Abdul Jalil, M.EI

Editor : Widi Nugraha

Desain Cover & Layout :
CipArt

Diterbitkan oleh:
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah

Cetakan : Pertama
November 2015

DAFTAR ISI

Modul I Budaya Demokrasi

Tujuan Pelatihan	02
Standar Kompetensi	02
Indikator Pencapaian	02
Bahan Pelatihan	02
Metode Pelatihan	02
Materi	02
A. Pendahuluan	03
B. Demokrasi dan Politik	04
1. Relasi Politik dan Demokrasi	04
2. Demokrasi antara Idealitas dan Realitas	10
C. Pengaruh Budaya Jawa dalam Demokrasi	19
1. <i>World View</i> Politik Jawa	23
2. Sultan Agung: Model Penguasa Jawa	30
3. Budaya Jawa dalam Pancasila	32
4. Budaya Jawa dalam Demokrasi Desa	35
D. Bahan Bacaan	

Modul I

Budaya Demokrasi

- ❖ **Tujuan Pelatihan:**
Memahami budaya politik Jawa sebagai bagian dari demokrasi di Indonesia.
- ❖ **Standar Kompetensi :**
Menganalisis budaya politik Jawa sebagai bagian dari demokrasi di Indonesia.
- ❖ **Indikator Pencapaian Kompetensi:**
Mendeskrripsikan pengertian budaya politik Jawa dan demokrasi.
Mengidentifikasi ciri-ciri budaya politik Jawa dan demokrasi.
Mendeskrripsikan macam-macam budaya politik dan demokrasi.
Menyimpulkan peran budaya politik Jawa dalam upaya mengembangkan demokrasi
- ❖ **Bahan**
LCD
Layar
Kertas plano
Spidol
- ❖ **Metode**
uraian lisan
Brainstorming
Kerja analisis

Budaya Demokrasi

A. PENDAHULUAN

Perjalanan bongkar pasang model demokrasi Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihan, akhirnya mengantarkan kita pada satu titik pemahaman akan pentingnya budaya unggul sebagai identitas dan budaya nasional. Budaya unggul sendiri didefinisikan sebagai semangat dan kultur untuk mencapai kemajuan dengan cara kita harus bisa, kita harus berbuat yang terbaik.

Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan negara, di mana sistem tersebut mengizinkan rakyat “memimpin” diwakili oleh badan-badan negara demi mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi di Indonesia sendiri sebenarnya sudah muncul sejak zaman penjajahan Belanda di mana pada masa itu banyak orang-orang dari kaum elit yang disekolahkan oleh Belanda dan banyak membaca tentang pemerintahan luar negeri sehingga mereka terekspos pada sistem demokrasi negara barat (Miriam Budiardjo, 2010).

Demokrasi sebetulnya telah diterima hampir semua pemerintahan di dunia. Bahkan pemerintah-

pemerintah otoriter sekalipun ikut-ikutan menggunakan atribut demokrasi untuk menggambarkan rezim mereka. Demokrasi pada dasarnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan kadang berliku-liku.

Literatur ilmu politik pada umumnya memberikan konsep dasar demokrasi. Apapun label yang diberikan kepadanya, konsep demokrasi akan selalu merujuk pada pemerintahan oleh rakyat. Implementasi konsep demokrasi pada tingkat nasional di dalam negara kebangsaan yang berskala besar adalah bahwa tindakan-tindakan pemerintah itu pada umumnya tidak dilakukan secara langsung oleh warga negara, melainkan secara tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih berdasarkan prinsip kebebasan dan kesamaan. Dalam telaah umum politik, praktek demokrasi semacam ini tergolong dalam demokrasi tidak langsung.

Ada dua tataran berpikir mengenai demokrasi yang harus dipisahkan antara satu dengan lainnya. Pertama, demokrasi sebagai ide atau konsep dan kedua demokrasi sebagai praksis. Sebagai ide atau konsep, siapapun akan dapat menyusun suatu daftar sangat panjang mengenai arti, makna dan sikap serta perilaku yang tergolong demokratis. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat, kebebasan memilih adalah beberapa contoh ide demokrasi yang dapat diberikan. Kedua

sebagai praksis, demokrasi sesungguhnya sudah menjelma menjadi sistem. Sebagai sebuah sistem, kinerja demokrasi terikat oleh seperangkat aturan main tertentu. Apabila dalam sistem demokrasi ini ada orang yang tidak mentaati aturan main yang berlaku, maka aktivitas itu akan merusak demokrasi. Dengan kata lain, aktivitas ini dalam konteks sistem demokrasi, menjadi tidak demokratis atau antidemokrasi (Rahmatullah, 2011).

B. Demokrasi dan Politik

1. Relasi Politik dan Demokrasi

Tarik menarik kepentingan dalam pentas nasional antara KMP-KIH, Polri-KPK, DPR dan Lembaga Kepresidenan memperlihatkan dengan jelas tentang seluk beluk dan rumitnya pbumian demokrasi di bumi Indonesia. Di atas permukaan, pemilu dan pilpres bisa dianggap telah berjalan sesuai dengan persyaratan (minimal) demokrasi yang sampai derajat tertentu mencerminkan kebebasan dan sejenisnya.

Namun penilaian yang lebih tajam terhadap semua proses dan hasil pemilu ini, akan mengantarkan kepada kesimpulan yang cukup menggugat, bahwa apa yang telah kita capai ini tidak bisa sepenuhnya menjamin sebagai representasi aspirasi murni masyarakat. Kita, misalnya, tidak dapat melakukan simplifikasi persoalan dengan menyatakan bahwa kemenangan PDI-P dan Jokowi adalah manifestasi kepercayaan masyarakat luas.

Beragam faktor yang sangat kompleks, mulai dari keterbelakangan masyarakat, ketidakpastian masa depan politik, hingga *money politic* ikut andil dalam mengantarkan kemenangan mereka.

Sejauh ini, demokrasi yang berkembang di negara kita masih lebih menampakkan wajahnya yang bersifat formal daripada yang bersifat substantif. Hal itu dapat dilacak dari belum maksimalnya partisipasi aktif mayoritas warga negara dalam pemerintahan dan belum tersedianya saluran efektif dalam mewadahi partisipasi mereka. Partisipasi murni warga dan saluran efektif merupakan karakteristik utama demokrasi substantif. Melalui itu, mereka yang tidak berdaya bisa memiliki suara nyata dalam penentuan arah bangsa.

Selama ini kesan kuat yang tampak di negara kita, masyarakat terlibat (atau lebih tepatnya dilibatkan) dalam kebijakan yang bersifat publik hanya pada momen-momen tertentu yang terkait dengan kegiatan formal demokrasi, semisal pemilu dan sejenisnya. Selepas itu, masyarakat biasanya akan terantuk pada kesulitan cukup parah untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan mereka. Komunikasi mereka dengan wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga legislatif sering tersumbat dengan kerikil-kerikil birokratis, yang hanya akan lancar kembali manakala partai politik dan para wakil rakyat memerlukan suara mereka kembali.

Di saat warga negara diperlukan, negara dalam arti yang seluas-luasnya—termasuk partai politik dan anggotanya yang ada di legislatif—mulai menaburkan janji-janji muluk, pemberian harapan yang utopis dan sejenisnya. Alhasil, keterlibatan masyarakat lebih diorientasikan kepada kepentingan negara dan segala perangkatnya. Oleh karena itu, upaya serius untuk memberdayakan warga negara, serta pengembangan wawasan tentang hak, dan tanggung-jawab mereka tampak kuat belum menjadi agenda dan prioritas utama dalam proses demokrasi yang sedang berjalan. Kondisi semacam itu menjadikan masyarakat kurang memiliki kepekaan dan ketajaman politik. Penentuan mereka untuk mendukung atau tidak mendukung terhadap suatu partai politik lebih banyak didasarkan pada hal-hal yang bersifat emosional, pragmatis, dan semacamnya.

Keberlanjutan kondisi ini membuat demokrasi akan berjalan terus pada tataran formal dengan segala keruwetannya dalam bentuk terjadinya ambivalensi antara yang tampak di permukaan dan realitas yang tersembunyi. Sisi-sisi buram itu yang perlu menjadi perhatian kita dalam penegakan demokrasi. Dalam konteks itu, isu urgen untuk diangkat berpijak pada persoalan pengembangan demokrasi ke depan yang ditekankan pada upaya pelibatan murni masyarakat luas secara lebih aktif dan lebih menentukan. Demokrasi yang perlu dikembangkan ke depan adalah demokrasi substansial yang benar-benar

mampu mengangkat aspirasi masyarakat, serta memberdayakan mereka dari segala bentuk ketertindasan dan rekayasa yang dapat memandulkan ketajaman hati nurani mereka.

Terkait dengan itu, hasil riset partisipatoris yang dibukukan menjadi *Reviving Democracy* oleh Barry Knight, Hope Chigudu dan Rajesh Tandon cukup signifikan untuk diangkat sebagai bahan pertimbangan penyusunan agenda pengembangan demokrasi di Indonesia ke depan. Penelitian yang disponsori oleh Commonwealth Foundation dengan subyek yang terdiri dari 10.000 warga negara pada 47 negara itu menyebutkan, masyarakat luas menginginkan pendalaman (pengakaran) demokrasi (*deepening democracy*) dari yang bersifat representatif ke bentuk yang partisipatoris dan langsung. Hal ini menuntut suatu aksi yang komprehensif yang mencakup sikap, perilaku, proses dan struktur yang harus dilakukan kedua belah pihak; negara dan masyarakat.

Untuk itu, hasil penelitian lebih jauh menyebutkan, masyarakat sipil harus tumbuh dengan kokoh melalui pengembangan warga negara yang sadar diri, memiliki informasi yang luas, dan memahami hak dan tanggung-jawab mereka. Selain itu, mereka harus bisa mengembangkan solidaritas, kedermawanan, dan dukungan satu dengan yang lainnya, berpartisipasi dalam agenda yang bersifat

publik, serta mampu menunjukkan sikap mereka yang asertif, caring, dan penuh keadaban.

Sejalan dengan itu, riset itu menyimpulkan, perlunya negara kuat, tapi sekaligus sensitif sehingga mampu mendorong tumbuhnya partisipasi politik, melindungi hak-hak asasi manusia, serta menegakkan keadilan sosial dan sejenisnya. Negara yang diperlukan adalah negara yang mampu berjalan di antara dua celah yang berbahaya; antara sikap dominan, totalitarianistik, hegemonik, dan terpusat di satu pihak, dan sikap *laissez faire*, dan tidak memiliki daya dalam mengontrol pasar pada pihak lain. Negara harus menjadi semacam penyedia bagi *demand* (baca: kepentingan) warga negara.

Berdasarkan hal itu, satu hal yang perlu dilakukan adalah memaknai demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang *perennial* sehingga memiliki arti signifikan bagi kehidupan warga negara. Pemaknaan ini menuntut kita untuk meletakkan demokrasi di atas landasan moral sebagai upaya membumikan kesetaraan dan keadilan, serta keadaban dalam berbagai aspeknya. Di atas nilai-nilai itu, proses dan struktur politik perlu dibenahi yang bisa memberikan ruang luas bagi partisipasi semua warga negara yang lebih langsung dan menentukan.

Dengan pemaknaan demokrasi yang bersifat moral, serta membumikannya secara kokoh dalam sikap dan perilaku warga negara, pendulum

kehidupan akan terus bergerak ke arah yang lebih baik. Mereka akan memiliki kesadaran tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam urusan publik, serta mengenai hak dan tanggung jawab untuk mengelola dan menentukan arah bangsa. Dengan demikian dari saat ke saat mereka akan mengalami pemberdayaan. Mereka akan terbiasa menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi dengan keadaban dan solidaritas yang kokoh. Pada saat yang sama, mereka terus berproses menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Selama fenomena itu belum tampak ke permukaan, kita rasanya sulit untuk menyatakan bahwa kehidupan yang kita jalani berada di atas nilai-nilai demokrasi substantif. Konkretnya, kita mungkin sekadar bermain-main dengan simbol-simbol demokrasi melalui politik dan partai politik.

Demokrasi sejatinya identik dengan moral-universal yang memiliki landasan teologis pada ajaran agama-agama. Demokrasi adalah moral karena *concern* utamanya terletak pada pembumian kedamaian yang dibingkai nilai-nilai keadilan dan kesederajatan dan keadaban dengan tujuan terciptanya kesejahteraan dan ketenangan individu dan masyarakat sebagaimana hal itu menjadi misi dan tujuan agama. Dengan demikian, demokrasi akan terus seiring dan sejalan dengan kedamaian.

Demokrasi yang penuh dengan kekerasan dan berlumuran darah bukan lagi demokrasi, tapi

democracy. Konflik memang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan karena hal itu memang diyakini sebagai bagian dari kehidupan umat manusia. Setiap individu, setiap masyarakat memiliki pandangan sendiri dan kepentingan yang beragam. Pada sisi itu konflik dapat berkembang menjadi pertentangan. Namun dalam suatu masyarakat atau bangsa yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, konflik akan dikelola sedemikian rupa dan diarahkan menjadi pengkayaan wawasan untuk mencapai kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa yang sampai derajat tertentu mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang lebih kecil (Rahmatullah, 2011).

Konflik tidak akan pernah menjadi pertentangan terbuka, atau akan bermetamorfosis sebagai kekerasan dan sejenisnya jika setiap individu, kelompok, dan sebagainya mampu men-*candera* dan mengedepankan kepentingan mereka yang bersifat rasional dan obyektif, serta sekaligus dapat melepaskan kepentingan sempit mereka yang bersifat subyektif. Rasionalitas dan obyektifitas adalah moral *perennial* yang dapat menjadi titik temu segala pandangan dan kepentingan. Melalui rasionalitas, dialog yang dialogis–meminjam istilah Raimondo Panikkar–akan berkembang untuk membuka kelemahan diri sendiri dan sekaligus melihat kelebihan yang terdapat pada pihak lain yang pada gilirannya akan menumbuhkan pandangan yang

obyektif dan tujuan luhur yang dapat menyatukan kepentingan di altar kebersamaan.

Pada sisi itu, demokrasi berperan besar untuk menyadarkan masyarakat tentang signifikansi rasionalitas dan obyektifitas dalam kehidupan, terutama dalam hidup berbangsa dan bermasyarakat yang akan mengantarkan mereka kepada wawasan yang cukup memadai mengenai hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, keseluruhan masyarakat dengan segala komponennya akan mau berbagi dalam kehidupan dalam rangka mencapai tujuan luhur secara bersama.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai itu sampai derajat tertentu masih terasa absen dalam kehidupan masyarakat. Demokrasi lebih ditampakkan sebagai dominasi mayoritas terhadap minoritas. Kepentingan bersama, kepentingan bangsa terkesan dibiarkan menjadi kepentingan mayoritas. Mayoritas mentahbiskan diri sebagai representasi bangsa dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya, kelompok minoritas dipaksa mengalah kepada kelompok yang mayoritas.

Pada masa lalu, ketika Pemilu mendekati pelaksanaan dan terus berlanjut pada saat wakil rakyat hasil Pemilu bersidang, kelompok mayoritas menampilkan unjuk kekuatan, memaksakan kehendak-eksplisit atau implisit-untuk menggoalkan kepentingan subyektif mereka, serta sekaligus menghadang dengan segala cara, bahkan

dengan kekerasan aspirasi dan kepentingan kelompok lain. Pola kekerasan itu pada saat yang sama juga dijadikan rujukan oleh kelompok-kelompok lain yang lebih kecil. Pemaksaan kehendak, kekerasan, premanisme dan sejenisnya bukan lagi sekadar tindakan reaktif, tapi telah menjadi semacam “ideologi” yang telah merasuki otak kelompok-kelompok yang bertebaran di masyarakat luas, termasuk para elit politiknya.

Para elit dan pelaku politik telah dirasuki-meminjam ungkapan Benda-passion politique. Kemenangan menjadi tujuan utama yang menggantikan tujuan-tujuan luhur yang nyaris terbengkalai, tidak pernah disentuh secara serius oleh para pelaku politik. Untuk itu, praktik-praktik kotor seperti *money politic*, pengkambing-hitaman dan sejenisnya menjadi fenomena perjalanan politik di Indonesia. Masyarakat pun seakan-akan ikut mendukung dengan membiarkan praktik-praktik kotor itu berlangsung terus tanpa ada gugatan yang cukup berarti kecuali suara-suara kecil yang tidak memiliki gaung yang dapat menghentikan proses penghancuran demokrasi. Diakui atau tidak, itulah carut marut proses demokratisasi yang tentunya sangat mengancam masa depan Indonesia.

Untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam menjalani proses demokratisasi, terutama menjelang Pemilu, saat pelaksanaan, dan masa-masa sesudahnya, para elit politik menjadi niscaya untuk

tidak menjadikan kekuasaan dan kemenangan sebagai tujuan. Mereka seutuhnya harus mempersiapkan diri sebagai wakil rakyat dan abdi masyarakat dengan mengemban amanat untuk membawa aspirasi masyarakat, memperjuangkan, dan mengaktualisasikannya, serta menjadikan mereka sendiri sebagai demokrat sejati. Pada saat yang sama mereka perlu menyikapi masyarakat sebagai subyek untuk pengembangan demokrasi dengan mengantarkan masyarakat—terutama di kelompok akar rumput dan pendukung setia partai-partai politik—kepada kondisi yang membuat mereka “melek politik”. Masyarakat perlu disadarkan tentang hak-hak politik substansial, alasan dan tujuan memilih partai tertentu, serta cara menyikapi persoalan politik yang dihadapi mereka secara adab dan demokratis.

Agama pun perlu dijadikan landasan dalam mengantarkan proses demokrasi menuju tujuan ideal. Para tokoh agama—ulama dan rohaniawan—sejatinya tidak perlu terjun ke dalam dunia politik praktis yang sampai saat ini masih sarat dengan pragmatisme. Pengambilan jarak dengan dunia politik praktis diharapkan memberikan kesempatan luas bagi mereka untuk menerjemahkan ajaran agama ke dalam nilai-nilai moral substansial yang transformatif, tanpa harus terperangkap ke dalam kepentingan sesaat dan sektarian. Nilai-nilai itu yang harus dipraktikkan pertama kali oleh para tokoh agama. Selanjutnya

diupayakan untuk dijadikan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik praktis secara khusus, dan pengembangan demokrasi secara umum.

2. Demokrasi Antara Idealitas dan Realitas

Cita-cita untuk menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif, mengakibatkan munculnya gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dengan suatu konstitusi. Baik dengan naskah konstitusi yang tertulis (*written constitution*) ataupun dengan konstitusi tidak tertulis (*unwritten constitution*). Di dalam konstitusi biasanya ditulis hak-hak warga negara, serta pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen (legislatif) dan lembaga-lembaga hukum lain, sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan.

Demokrasi konstitusional adalah sebuah gagasan bahwa pemerintah merupakan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tunduk pada pembatasan konstitusi, agar kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan. Konstitusi tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan (legislatif, eksekutif dan yudikatif), akan tetapi konstitusi dipandang sebagai suatu lembaga yang memiliki fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintahan di satu pihak, dan menjamin hak-hak asasi dari warga negaranya. Konstitusi dianggap

sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil "*government by laws, not by men*" (pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kemauan penguasa).

Abad 19 dan permulaan abad 20 gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan mendapat landasan yuridis. Sejak ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah *rechtsstaat*, sedangkan ahli Anglo Saxon seperti AV Dicey memakai istilah *rule of law*.

Empat pilar demokrasi yang didasarkan *rechtsstaat* dan *rule of law* dalam arti klasik adalah:

- a. Hak-hak manusia.
- b. Pemisahan dan pembagian kekuasaan yang populer dengan "*trias politica*".
- c. Pemerintah berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan (Miriam Budiardjo, 1983).

Sebagai perbandingan pilar-pilar demokrasi yang didasarkan konsep *rule of law* menurut AV Dicey adalah:

- a. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang.
- b. Kedudukan yang sama dalam hukum (dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat).

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.

Konsep demokrasi berdasarkan *rule of law* lahir dari paham liberalisme yang menganut dalil "negara sebagai penjaga malam". Pemerintahan hendaknya tidak terlalu banyak mencampuri urusan warga negaranya, kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum seperti bencana alam, hubungan luar negeri dan pertahanan serta keamanan.

Perkembangan selanjutnya, pada abad ke-20 terutama sesudah Perang Dunia II telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap ekseseks dalam industrialisasi dan sistem kapitalis. Tersebarinya faham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata serta kemenangan dari beberapa partai sosialis di Eropa.

Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara, baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi, lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Pada dewasa ini, demokrasi harus meluas mencakup dimensi ekonomi dengan suatu sistem yang menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi yang berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi,

terutama perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara semacam ini dinamakan *welfare state* (negara kesejahteraan) atau *social service state* (negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat).

Negara-negara modern dewasa ini mengatur soal-soal pajak, upah minimum, pensiun, pendidikan umum, asuransi, mencegah atau mengurangi pengangguran dan kemelaratan serta timbulnya perusahaan-perusahaan raksasa (*anti trust*), dan mengatur ekonomi sedemikian rupa sehingga tidak diganggu oleh depresi dan krisis ekonomi. Oleh karena itu pemerintah dewasa ini mempunyai kecenderungan untuk memperluas aktivitasnya. Sesuai perkembangan zaman, maka dirumuskan kembali konsep *rule of law* (negara hukum) versi abad 20, terutama setelah perang dunia II. International Commission of Jurists, yang merupakan ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965, merumuskan pemerintah yang demokratis adalah sbb:

- a. Perlindungan konstitusional, konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula prosedur untuk perlindungan hak-hak yang dijamin.
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- c. Pemilihan umum yang bebas.

- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- e. Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi dan beroposisi.
- f. Pendidikan kewarganegaraan.

Sebuah negara dapat dikatakan memiliki "sistem politik demokratis" manakala kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas kesamaan dan kebebasan politik berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai tersebut adalah:

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga,
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah,
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur,
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum,
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat,
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Sebagian ahli menyebut nilai yang dapat dijadikan parameter demokrasi adalah:

- a. Partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan. Di dalam demokrasi perwakilan partisipasi rakyat untuk membuat keputusan diwakili oleh

wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu diperlukan pemilu yang Luber dan Jurdil, agar wakil-wakil rakyat representatif.

- b. Persamaan kedudukan di depan hukum. Hukum diberlakukan sama bagi seluruh warga negara, baik pejabat, rakyat dan penjahat terlepas dari kalibernya masing-masing harus berada di bawah jangkauan hukum positif yang berlaku.
- c. Distribusi pendapatan secara adil. Keadilan ekonomi yang diwujudkan dalam upaya pembagian pendapatan secara adil.
- d. Kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penentu bagi seseorang untuk memperoleh pelayanan dan penghasilan yang layak. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara sama antar sesama warga negara harus dijadikan salah satu perhatian utama oleh penyelenggara negara.
- e. Kebebasan. Kebebasan, yang dapat menunjukkan derajat demokrasi suatu negara ada empat, yaitu kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Empat kebebasan tersebut dianggap sebagai hak-hak terpenting dari hak asasi manusia.
- f. Keterbukaan informasi. Informasi harus disediakan secara terbuka bagi rakyat agar selain mengetahui kualitas pemimpinnya, rakyat

mengetahui perkembangan situasi yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahnya.

- g. Tata krama (etika) politik, maksudnya adalah tata krama politik yang mungkin tidak tertulis tetapi jelas dirasakan baik buruknya oleh hati nurani. Kesiediaan mengundurkan diri harus dianggap sebagai hal yang wajar oleh pejabat yang mengotori jabatannya dengan tindakan-tindakan korup.
- h. Kebebasan individu. Setiap individu supaya diberi hak untuk hidup secara bebas dan memiliki privacy seperti diinginkan. Sejauh tidak merugikan orang lain, setiap individu dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri.
- i. Semangat kerjasama. Untuk mempertahankan eksistensi masyarakat berdasarkan jiwa kemasyarakatan yang mendorong saling menghargai antar sesama warga, maka semangat kerja sama perlu ditumbuhkembangkan.
- j. Hak untuk protes. Demokrasi harus membuka pintu bagi koreksi atas terjadinya penyelewengan untuk keadaan tertentu, meskipun pendekatan institusional dan legalistik tidak lagi memadai, tindakan protes harus ditolerir agar jalannya pemerintahan yang menyimpang dapat diluruskan lagi (Udin Saparudin Winataputra, 2002).

Dari paparan di atas, pada garis besarnya untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan berbagai lembaga sebagai berikut:

- a. Pemerintah yang bertanggungjawab,
- b. Dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan dipilih dalam pemilu yang bebas,
- c. Perlu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik, pers yang bebas yang menyatakan pendapat,
- d. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi.

Sayangnya, mempraktekkan demokrasi tidak semudah membalikkan tangan. Indonesia pernah mengalami proses bongkar pasang demokrasi. Pada masa Orde Lama yang berlangsung dari awal tahun 1950, mulai terjadi banyak perpecahan pada sistem sosial di Indonesia menyusul berakhirnya perjuangan bersama untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Perpecahan tersebut menyerang hampir seluruh lini mulai dari kultur, moral, tradisi, marxisme, dan ketakutan bahwa masyarakat Jawa akan mendominasi dunia politik. Oleh karena perbedaan ini, beberapa gerakan separatis mulai muncul dan menentang Republik Indonesia, seperti misalnya Darul Islam yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia dan melakukan serangan gerilya pada tahun 1948 hingga 1962. Di Maluku juga terjadi hal

yang sama, dimana masyarakat Ambon yang pada masa itu adalah bekas tentara Hindia Belanda menuntut kemerdekaan terhadap Republik Maluku Selatan. Hal yang sama juga muncul di Sumatera dan Sulawesi pada tahun 1955 dan 1961.

Perjalanan demokrasi di Indonesia dimulai dengan demokrasi liberal yang diterapkan pada tahun 1950. Pada saat itu terjadi banyak sekali pergantian kabinet, dimana kabinet paling sukses hanya dapat berjalan 2 tahun. Bahkan, pemilihan umum pertama yang dilangsungkan pada tahun 1955 gagal membawa kestabilan politik di Indonesia.

Pada Oktober 1956, Soekarno melakukan kunjungan resmi ke Republik Rakyat Tiongkok dimana ia terpukau dengan perkembangan yang ada di sana setelah perang sipil. Soekarno berkesimpulan bahwa hal ini dipengaruhi oleh kemampuan Mao Zedong untuk memimpin, dimana sentralisasi kekuatannya sangat kontras dengan kekacauan politik di Indonesia. Setelah pulang dari kunjungan tersebut pada 30 Oktober 1956, Soekarno membicarakan konsep barunya tentang sistem pemerintahan yang baru di mana dua hari sebelumnya ia meminta partai-partai politik untuk dikubur. Awalnya, partai-partai tersebut menolak, tapi setelah diberi tahu bahwa mereka tidak harus dihancurkan, Partai Komunis Indonesia (PKI) memberikan dukungan mereka pada Soekarno.

Pada 21 Februari 1957, Soekarno membeberkan detail rencananya. Ia menekankan bahwa pada tingkat pedesaan, pertanyaan-pertanyaan harus diselesaikan dengan tujuan mencapai kosensus. Model pengambilan keputusan ini lebih cocok dengan Indonesia dibandingkan demokrasi ala barat. Dengan sistem yang kemudian menjadi tonggak sejarah demokrasi di Indonesia bernama 'demokrasi terpimpin' ini, Soekarno menggambarkan bahwa ia akan memimpin para tetua desa pada level nasional.

Tonggak awal masa ini adalah Soekarno memerintahkan untuk kembali menggunakan UUD 1945 dan meninggalkan UUDS 1950. Pemerintah tersebut tentu saja menuai banyak protes dari anggota konstituante, meski tak sedikit juga yang setuju. Demi menyelesaikannya dengan adil, diadakan sebuah pemungutan suara oleh seluruh anggota dengan hasil 269 suara setuju untuk kembali menggunakan UUD '45, dan 119 tidak setuju. Hasil voting yang berat sebelah itu menyimpulkan bahwa pemerintah Soekarno akan dilaksanakan.

Masa demokrasi terpimpin ini dipenuhi dengan kerjasama orang-orang PKI dengan kaum borjuis, di mana mereka menekan pergerakan yang dilakukan oleh para buruh dan juga petani-petani yang ada di Indonesia. Hal yang dilakukan oleh para borjuis dan pimpinan PKI ini gagal dan banyak efek domino yang terjadi seperti turunnya pendapatan ekspor, devisa

yang terus turun cadangannya, inflasi yang terus melonjak naik, hingga korupsi yang terus terjadi. Terjadinya semua itu mendorong banyaknya demonstrasi yang digerakkan oleh para buruh, mahasiswa dan petani.

Pada 30 September 1965, terjadi sebuah insiden yang diberi nama “Gerakan 30 September” (G30S) yang menewaskan 6 perwira TNI yang paling senior saat itu. Setelah aksi ini ditutup dengan pembersihan komunis yang menewaskan 500.000 jiwa dan secara total menghancurkan PKI, Soekarno terpaksa melakukan transfer kekuatan politik dan militer kepada Soeharto. Soeharto akhirnya resmi ditunjuk sebagai presiden pada tahun 1968.

Meski naiknya Soeharto membawa kestabilan di bidang ekonomi dan politik, terjadi perubahan lagi dalam sejarah demokrasi di Indonesia di mana partai politik disederhanakan menjadi hanya tiga kekuatan besar yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, PSSI, PERTI, dan Parmusi; Partai Demokrasi Indonesia (PDI), gabungan Partai Katolik, Parkindo, IPKO, PNI, Partai Murba, dan Golongan Karya (Golkar).

Sejarah demokrasi di Indonesia terus berlanjut hingga di masa reformasi. Masa ini diawali dengan mundurnya Presiden Soeharto dan digantikan BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

Dari refleksi perhelatan demokrasi di Jawa Tengah selama masa reformasi yang dihimpun oleh Litbang Kompas terungkap bahwa demokrasi di Jawa Tengah masih belum optimal. Demokrasi masih bertumpu pada optimalisasi peran partai politik sebagai elemen utama lanskap politik lokal.

Sayangnya, Partai politik belum mampu memainkan peran pemegang legitimasi dalam mentransformasi sistem politik tradisional yang feodalistis menjadi sistem politik modern yang demokratis. Parpol belum sepenuhnya menjadi agen konsolidasi demokrasi yang menggeser sistem feodalistis yang berbasis kekuasaan personal menjadi sistem demokrasi yang berbasis pada kekuasaan rakyat. Parpol juga belum berperan sebagai agen konsolidasi demokrasi dalam menciptakan kesejahteraan rakyat (Litbang Kompas.com, 2015).

Fenomena ini membuat aspirasi masyarakat seringkali terabaikan, digerus oleh egoisme elit partai. Masyarakat nyaris tidak mendapatkan saluran yang tepat untuk menyuarakan dan mengangkat aspirasi mereka. Para calon, meskipun penjangingannya terkesan berangkat dari bawah, dari kepengurusan partai di tingkat paling bawah, sejatinya telah ditentukan dari atas, dari elit partai di tingkat kabupaten, kotamadya, atau tingkat propinsi. Akhirnya masyarakat dipaksa memilih figur-figur

yang sama sekali tidak sesuai dengan keinginan atau pertimbangan murni mereka.

Semua proses dan praktik yang diungkap di atas memperlihatkan tentang terjadinya demoralisasi demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang dilihat dari sudut manapun sebenarnya bersifat moral ternyata dalam realitas yang kita hadapi harus dipertaruhkan untuk kepentingan sempit dan sesaat. Ironisnya, pertaruhan ini dikembangkan atas nama demokrasi. Di sana, nilai-nilai moralitas yang dikandung demokrasi, semisal kebebasan, menjadi cair, menguap dalam belantara keangkuhan para elit politik dan ambisi-egoistis para petingginya. Kebebasan masyarakat untuk mengangkat aspirasi dan menentukan calon atau pemimpin di daerah mereka telah dipasung melalui rekayasa sistematis yang dikembangkan partai politik.

Keberlangsungan fenomena tersebut dipastikan akan menghancurkan sendi-sendi demokrasi. Oleh karena itu, komitmen bangsa untuk mengembangkan demokrasi dan melabuhkannya dalam kehidupan meniscayakan pengembalian demokrasi kepada prinsip-prinsipnya yang otentik dan luhur. Dalam kerangka itu, daerah sebagai bagian dari negara dengan segala unsur yang ada di dalamnya perlu menjadikan kebebasan masyarakat sebagai awal proses demokratisasi dan sebagai bagian tak terpisahkan dari seluruh kebijakan yang

dikembangkan. Dalam *The Philosophy of Right*, Hegel menyebutkan, *the state is the actuality of concrete freedom*.

Namun lebih lanjut ia mengingatkan, *but concrete freedom requires that personal individuality and its particular interests should reach their full development and gain recognition of their right for its self, and also that they should, on the other hand, pass over of their own accord into the interest of the universal, and on the other, knowingly and willingly acknowledge this universal interest even as their substantial spirit, and actively pursue it as their ultimate end*.

Dalam konteks Indonesia, persoalan yang perlu menjadi perhatian dan ditumbuhkembangkan ke depan adalah pengembalian kebebasan bagi warga masyarakat untuk menentukan kepentingan mereka sendiri dan menyalurkan aspirasi mereka yang hakiki. Pada saat yang sama, mereka hendaknya dapat meletakkan kepentingan dan aspirasi itu dalam kerangka kepentingan bersama, kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan kepentingan bangsa.

Partai politik dan semua kelembagaan politik yang ada hendaknya menjadi garda depan dalam melabuhkan kebebasan dan nilai-nilai demokrasi yang lain dalam ruang publik. Terkait dengan itu, partai politik, terutama elitnya, dituntut untuk mau melepaskan kepentingan sempit dan sesaat yang saat ini masih melekat kuat pada mereka. Elit politik

melalui partai mereka menjadi niscaya untuk membumikan nilai-nilai demokrasi dengan kokoh.

Kita tentu tidak dapat menundanya lagi. Bermain-main dengan simbol-simbol demokrasi tanpa menjadikan nilai-nilai substansialnya sebagai entitas menyatu dalam kehidupan politik hanya akan mempertaruhkan demokrasi dengan resiko yang amat besar. Permainan akrobatik yang selama ini lekat dengan proses pelaksanaan pilkada hanya akan mengantarkan demokrasi menjadi serpihan tanpa makna, dan pada gilirannya tidak mustahil akan menjadikan sendi-sendi Negara ambruk.

C. Pengaruh Budaya Jawa dalam Demokrasi

Budaya politik adalah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Gabriel Abraham mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka

ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem tertentu. Sistem itu bisa saja suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.

Jadi, budaya politik menunjuk kepada orientasi dan tingkah laku individu/masyarakat terhadap sistem politik. Menurut Almond dan Powell, orientasi individu terhadap sistem politik dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif.

Orientasi kognitif meliputi pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Misalnya tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang mereka ambil, simbol-simbol sistem politik seperti: ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas negara, mata uang, dan sebagainya.

Orientasi afektif menunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional seorang individu terhadap sistem politik, sehingga seorang dapat menerima atau menolak sistem politik tertentu.

Orientasi evaluatif yaitu penilaian moral seseorang terhadap sistem politik berdasarkan norma-norma yang dianut dan disepakati bersama tentang kinerja suatu sistem.

Contoh kongkrit dari budaya politik tersebut bisa kita lihat dalam disertasi Geertz yang dikenal

dengan *abangan*, *santri*, dan *priyayi*. Masyarakat Jawa, kata Geertz, memiliki sistem sosial dengan kebudayaan Jawanya yang akulturatif dan agamanya yang sinkretik, terdiri dari tiga sub-kebudayaan Jawa yang masing-masing merupakan struktur sosial yang berlainan. Struktur sosial yang dimaksud adalah *kaum abangan*, *santri* dan *priyayi*.

Tiga varian tersebut masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. *Varian abangan* merupakan masyarakat yang cenderung diartikan sebagai kelompok tidak memiliki ketaatan terhadap syariat agama Islam, varian ini diidentikkan sebagai kaum kecil (*wong cilik*) yang orientasi hidupnya hanya bersifat keduniawian, biasanya bekerja sebagai petani ataupun buruh di desa-desa. Pada saat pemilihan umum, varian ini memiliki kecenderungan (preferensi) pilihan politiknya pada partai nasionalis, khususnya Partai Nasionalis Indonesia (PNI), namun sekarang kultur dan ideologi PNI berpindah (transformasi) pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Berpindahnya kultur dan ideologi PNI ke PDIP dinilai sangat wajar, hal ini dikarenakan faktor sejarah (*history*) bahwa PNI adalah partai yang didirikan Ir. Soekarno Presiden Pertama Republik Indonesia. Setelah wafatnya Soekarno, PNI mengalami kemunduran drastis dipentas politik nusantara. Pada akhirnya nakhoda kepartaian sebagai trah Presiden Soekarno diambilalih oleh

putrinya Megawati Soekarnoputri dengan mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam rangka melanjutkan dan menghidupkan ideologi dan cita cita Soekarno.

Varian kedua adalah *santri*, kelompok ini menekankan pada aspek-aspek Islam demi menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama, kelompok ini diidentikkan sebagai saudagar atau pedagang di pasar pasar, pada saat pemilihan umum kelompok *santri* biasanya memiliki kecenderungan untuk memilih partai Islam sebagai sarana menyalurkan aspirasi politik mereka, Partai Masyumi dan NU menjadi pilihan ideal bagi varian ini. Namun, dinamika politik di Indonesia memaksa Partai Masyumi dan NU membubarkan diri atau lebih tepatnya dibubarkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa saat itu demi menjaga dan mempertahankan kekuasaan (*status quo*). Berkat kader kadernya yang militan, kini ideologi partai Islam tersebut ada pada PPP, kemudian muncul dan berkembang pula PKB serta PAN.

Varian terakhir adalah *priyayi*, kelompok ini merupakan kelompok elit di tengah-tengah masyarakat 'mojokuto' saat itu. Priyayi merupakan kaum birokrat teknokrat yang bekerja di kantor-kantor ataupun instansi pemerintahan. Dalam pemilihan umum, varian *priyayi* biasanya

menjatuhkan pilihan politik pada Partai Golongan Karya (Golkar).

Melengkapi Geertz, Affan Gaffar membuat kategori budaya politik menjadi:

1. Budaya politik tradisional

Yaitu budaya politik yang mengedepankan satu budaya dari etnis tertentu yang ada di Indonesia. Contoh “Paham Masyarakat Jawa” di masa orde baru

2. Budaya politik Islam

Yaitu budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada satu keyakinan dan nilai agama tertentu, yaitu agama islam biasanya dipelopori oleh kelompok santri. Masyarakat santri dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok tradisional (NU) dan modern (Organisasi Muhammadiyah), kemudian PKS.

3. Budaya politik modern

Yaitu budaya politik yang mencoba meninggalkan karakter etnis tertentu dan agama tertentu. Dalam budaya politik modern terdapat subbudaya, seperti kelompok birokrat, intelektual, dan militer. Antara lain : Partai Demokrat, PAN, Hanura, Partai Gerindra, Partai Nasdem.

4. Budaya politik abangan

- Yaitu budaya politik yang menekankan aspek-aspek animisme, termasuk para petani, nelayan.
5. Budaya politik santri
Yaitu politik yang menekankan aspek-aspek keagamaan, khususnya agama Islam. Pekerjaan mereka biasanya pedagang. Masa lalu mereka berafiliasi pada NU dan Masyumi. Sekarang pada PKB dan PPP.
 6. Budaya politik priyayi
Yaitu budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi, masyarakat priyayi adalah masyarakat kelas atas atau kelompok aristokrat dan birokrat seperti para pegawai pemerintah, pada masa lalu mereka berafiliasi dengan partai PNI dan sekarang pada Partai Golkar.

Di lihat dari sisi partisipasi, budaya politik dikategorikan menjadi rendah, sedang dan tinggi. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan *parokial atau rendah* apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap proses-proses politik. Ciri-ciri perilaku mereka apatis, menarik diri terhadap kehidupan politik, tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas dan tidak terlalu berharap dalam sistem politik.

Budaya politik *sedang* adalah budaya politik dimana masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan sedang jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan.

Sementara budaya politik *tinggi (partisipatif)* yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Selain itu, merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.

Perbedaan budaya politik di atas sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan warga negara, tingkat ekonomi pelakunya sehingga semakin

sejahtera rakyat maka semakin tinggi tingkat partisipasi politiknya. Reformasi politik (*political will*) yaitu semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik, supremasi hukum yang adil, independen dan juga dipengaruhi media massa yang independen sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri.

1. World View Politik Jawa

Orang Jawa mempunyai cara tersendiri dalam memandang dunianya. Pandangan dunia di sini adalah keseluruhan sistem nilai yang menjadi kerangka acuan dalam memahami diri dan dunia di sekitarnya. Jadi pandangan dunia orang Jawa adalah suatu sistem filosofis yang menjadi struktur acuan orang Jawa dalam kehidupannya.

Franz Magnis-Suseno (1984) menuliskan, bahwa ada 4 lingkaran dalam pandangan dunia Jawa. Lingkaran pertama adalah sikap terhadap dunia luar yang dialami sebagai sebuah kesatuan kesadaran antara manusia, alam dan dunia adikodrati. Lingkaran kedua adalah penghayatan kekuasaan politik sebagai perpanjangan tangan kekuatan adikodrati. Lingkaran ketiga adalah pengalaman mistis-batiniah manusia Jawa dalam memahami eksistensi dirinya sebagai bagian dari alam. Lingkaran keempat adalah penentuan semua lingkaran di atas sebagai bagian dari takdir kehidupannya.

Menurut pandangan dunia orang Jawa, realitas tidak bisa dipahami secara terpisah. Untuk memahami konsep negara menurut orang Jawa tidak dapat dipisahkan dengan Tuhan, panen, dan wabah penyakit. Oleh karena realitas negara yang otoriter akibat kekuasaan absolut seorang raja dzolim tidak dapat dipisahkan dari kegagalan panen dan merebaknya wabah penyakit.

Orang Jawa memahami dunia dan ruang tempatnya berdiam sebagai entitas yang tidak terpisah dari kesadarannya. Bahkan, bukan hanya menyatu dengan kesadarannya, eksistensi manusia Jawa tertelan mentah-mentah oleh alamnya. Oleh karenanya, manusia Jawa memahami dirinya sebagai sebuah “res cogitans” yang mampu berefleksi tentang kesadarannya yang berjarak dengan ruang, kesadaran orang Jawa adalah bagian kecil dari ruang. Eksistensi manusia Jawa menyatu dengan alamnya, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan.

Berbeda dengan pemikiran Yunani setelah Sokrates, pandangan hidup orang Jawa tidak memisahkan antara pengetahuan dan kepentingan. Pengetahuan merupakan penalaran dari kehidupan sehari-hari yang menuju ke suatu titik tertentu dalam kehidupan manusia. Artinya, pengetahuan bukan sebuah usaha memikirkan

fenomena kehidupan yang direduksi secara ketat untuk kemudian dimurnikan menjadi sebuah teori. Pengetahuan dalam pandangan dunia orang Jawa bersifat intuitif dan diperoleh melalui *rasa*. *Rasa* adalah pintu gerbang sekaligus ruang tempat semua pemahaman tentang “kedalaman” dimulai dan diakhiri. *Rasa* bisa berarti pula hakikat, karena *rasa* adalah *rahsya* (*rahasia*), suatu ungkapan tentang realitas yang bersembunyi, terselubungi oleh fenomena (Stange, 1984). Berbeda dengan konsep rasio ala Barat, *rasa* adalah hakikat itu sendiri. Oleh karena kesadaran dalam pandangan dunia Jawa adalah bagian dari realitas, demikian juga halnya dengan *rasa*, maka memahami Tuhan, dan alam serta hukum-hukumnya adalah memahami manusia. Oleh sebab itu pemahaman tentang fenomena melalui *rasa* adalah pengetahuan yang sangat subyektif. Oleh karena itu tersingkapnya ‘hakikat’ hanya bisa dicapai ketika seseorang menjauhi hiruk pikuk kehidupan dan mendekatkan diri pada Tuhan dan seluruh alam semesta (termasuk diri manusia itu sendiri) melalui *rasa* (Mulder, 2005).

Francisco Budi Hardiman (2003) menyatakan bahwa semua pandangan ini dapat dijelaskan melalui istilah *bios theoretikos*. Pandangan dunia orang Jawa adalah pertautan antara teori dan praksis yang akhirnya menuju ke

arah kebijaksanaan sejati sebagai sebuah cita-cita kehidupan bersama.

Teori bagi orang Jawa adalah kontemplasi atas makrokosmos, dimana dia menemukan tertib alam semesta yang dapat dipakai untuk memahami kehidupan dirinya. Hal ini akhirnya memunculkan *primbon*, dan ramalan-ramalan masa depan ala Prabu Jayabaya dan Ranggawarsita. *Primbon* adalah sebuah buku catatan hasil kontemplasi atas fenomena alam karya leluhur orang Jawa yang berusaha menyingkap rahasia alam. *Primbon* memberikan ciri dan pola perilaku alam semesta dan cara penyingkapan hakikat alam lebih lanjut (Mulder, 2001).

Pandangan dunia orang Jawa yang berkesadaran tertutup dan masif ini ternyata justru menyebabkan keterasingan dirinya dari realitas. *Reasoning* yang hanya bersifat *appetizer* pada makan malam *olah rasa* dalam usaha mencapai kebijaksanaan sejati, akhirnya hanya menghasilkan pengetahuan yang bersifat sangat personal dan khusus. Artinya, sebuah konsep yang dihasilkan dalam pandangan dunia Jawa hanyalah hasil kontemplasi subyek yang terpisah dari komunikasi dari pihak luar.

Dialektika dalam *reasoning* orang Jawa selalu melalui tahap pengendapan subyektif lebih dahulu dalam *rasa*, sehingga hasil yang dicapai adalah sebuah modul yang siap dipakai dalam memahami realitas. Oleh sebab itu kontemplasi yang bersifat personal menggunakan metode intuitif ini memperoleh legitimasi validitas melalui pengalaman-pengalaman meta-empirik sebagai klaim kebenarannya. Hal ini mengakibatkan pengetahuan yang dihasilkan dianggap sah dan tak terbantahkan karena sering dianggap mistis. Misalnya tindakan Sultan Hamengkubuwono X ketika memimpin rapat akbar Yogyakarta dalam rangka menumbangkan Soeharto pada tanggal 20 Mei 1998, adalah hasil kontemplasinya setelah berpuasa selama 30 hari. Keputusan Sultan untuk melakukan tindakan ini dianggap benar, karena Sultan dianggap telah melakukan kontemplasi terhadap dirinya, Tuhan dan alam semesta. Hasil kontemplasi itu adalah datangnya *wangsit* yang melegitimasi keputusannya untuk mendukung Gerakan Reformasi 1997-1998.

Tertutupnya kinerja *rasa* dan kesadaran yang menyatu dengan alam ini tidak dapat dibantah, selain karena subyektif dan intuitif, *rasa* dan kesadaran memang tidak mengakui adanya “ruang bermain” tempat terjadinya dialog

antara unsur-unsur dari luar subyek ketika melakukan kontemplasi.

Makrokosmos dalam pemikiran Jawa dipahami sebagai keberlangsungan hidup pada tiap-tiap individu, sehingga tatanan kehidupan sosial pun akhirnya harus diusahakan berjalan dengan harmoni, serasi dan seimbang. Sejurus dengan pemikiran tersebut, manusia sebagai mikrokosmos hidup bersama dan secara resiprokal membantu menjaga makrokosmos sehingga keseimbangan diantara mereka dapat berjalan dengan baik. Sistem moral sosial ini mengajarkan orang Jawa untuk selalu mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri, dan berbuat baik, karena seluruh kehidupan manusia sudah dalam tatanan kosmos menuju suatu tujuan tertentu.

Politik, dalam pandangan pandangan orang Jawa, tidak dipahami hanya sebatas kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tindakan orang lain, bahkan ketika orang tersebut menentang. Kekuasaan dalam pandangan dunia Jawa bukanlah hasil sebuah relasi antar individu dengan individu lain atau kelompok. Kekuasaan menurut orang Jawa adalah kekuatan energi Ilahi yang meresapi seluruh kosmos, sehingga kekuasaan ini mempunyai eksistensi dalam dirinya sendiri.

Kekuasaan menurut orang Jawa adalah substansi yang hanya tergantung pada dirinya sendiri. Kekuasaan ini tidak didapat dari kekayaan, nama besar, kekuatan fisik atau militer, sehingga usaha-usaha untuk mencapainya melalui tindakan-tindakan empiris tidak akan berguna.

Kekuasaan yang meta-empiris ini menyatu dengan hakikat alam semesta dan bermanifestasi dalam kekuatan kosmos. Kekuasaan sebagai kosmos akan memusat pada seseorang yang dianggap layak dan patut menyandangnya. *Wahyuratu* dan *wangsit* sangat berperan besar dalam legitimasi kekuasaan seorang raja Jawa. Ketika seseorang memaklumkan diri sebagai raja, ia berarti mengajukan klaim bahwa ia menerima kekuasaan yang berupa kekuatan kosmos dan adikodrati serta mistis. Ia akan (dan harus) menunjukkan kemampuan supranatural atau *kasekten* (kesaktian) yang dianggap mewakili kekuatan kosmos. Oleh karenanya ketika ia mampung menunjukkan kemampuan itu, klaim bahwa ia memang memperoleh *wahyu ratu* dan mampu memusatkan kekuatan kosmos dianggap sah. *Wahyu ratu* bermakna ijin dari Tuhan yang melegitimasi seseorang untuk berkuasa atas rakyat, sekaligus ia harus bisa meyakinkan

penguasa lama untuk tunduk kepadanya, baik lewat jalan damai maupun peperangan.

Wangsit adalah petunjuk dari Tuhan yang berisi hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Seseorang harus berkontemplasi dan berefleksi sembari mengingkari dan menyiksa diri dengan berpuasa, tidak makan, tidak minum dan tidak tidur untuk meraih petunjuk tentang masa depan ini. Oleh sebab itu, posisi raja dalam pandangan dunia orang Jawa, adalah pusat kosmos sekaligus pusat kekuasaan.

Raja dalam pandangan dunia Jawa mempunyai kekuasaan absolut yang dilegitimasi oleh kekuatan Ilahi. Istilah yang dipakai untuk menggambarkan sifat-sifat raja adalah *gung binatara*, *sekti mandraguna*, *bahudhendha hanyakrawati* yang artinya agung bagai dewa, sakti luar biasa, penguasa ruang dan waktu.

Sebagai penguasa ruang dan waktu, tak ada yang dapat terlewat dari aliran kekuasaan seorang raja, sehingga kekuasaan dalam pandangan dunia Jawa selalu tunggal, homogen dan masif. Predikat *bahudhendha* mengandung kata *bahu* yang artinya ukuran keluasan dalam ruang, sementara *hanyakrawati* mengandung pengertian *cakra*, yang artinya waktu. Oleh karenanya istilah

bahudhendha hanyakrawati dapat dimaknai sebagai penguasa ruang dan waktu.

Perbandingan yang sesuai dengan istilah tersebut adalah interpretasi G. Moedjanto dalam Hans Antlov dan Sven Cederroth (ed), (2001). Gagasan kekuasaan yang plural dan terpecah tidak dikenal dalam pandangan dunia Jawa. Kelanggengan sebuah dinasti raja ditentukan oleh kemampuan raja yang berkuasa dalam memelihara kesinambungan kekuatan kosmos tersebut. Pemeliharaan kekuatan kosmos ini dilakukan salah satunya dengan mengumpulkan simbol-simbol kekuatan kosmos, yaitu pusaka-pusaka kerajaan.

Lombard (1996), menyebutkan bahwa fungsi pusaka ini teramat penting, karena simbolisasi penguasaan atas kekuatan kosmis hanya bisa ditandai olehnya. Artinya, seorang raja yang sedang berkuasa bisa setiap saat kehilangan legitimasi ketika ia tak lagi mampu menunjukkan kepemilikannya terhadap benda-benda tersebut. Pusaka berupa benda (gong kecil) bernama Kyai Becak, payung Kyai Tunggul Naga, rompi Kyai Antrakusuma, tombak Kyai Pleret dan Kyai Baruklinting, keris Kyai Joko Piturun, dan lain sebagainya, adalah ciri seorang raja yang mampu menguasai kekuatan kosmis, sekaligus mampu menjadi penguasa. Pusaka-pusaka ini tidak boleh

meninggalkan gedung pusaka dalam kompleks kraton, dan hanya dipertontonkan kepada khalayak pada saat-saat tertentu.

Raja memiliki seluruh ruang dalam alam semesta, sehingga sebagai kerajaan feodal, seluruh tanah di muka bumi menjadi milik raja. Sebagai penguasa dan pengendali kekuatan kosmos, pemusatan kekuasaan dan hak milik atas tanah sebagai sumber kehidupan ini menempatkan *kraton* (kota raja) sebagai pusat tatanan kosmos. Kraton dengan seluruh lingkungan di sekitarnya adalah pusat kosmos dan murni milik raja, dimana raja tidak perlu berbagi dengan rakyatnya. Oleh karenanya konsep *private property* tidak dikenal dalam sistem politik, sosial dan ekonomi kerajaan di Jawa.

Kotaraja sebagai pusat kosmos sekaligus pusat birokrasi dimengerti sebagai kediaman raja. Selain pasar besar sebagai pusat perekonomian kerajaan, kantor pusat administrasi, dan pusat kegiatan agama berupa masjid besar, salah satu ruang yang sangat penting bagi kotaraja adalah alun-alun.

Alun-alun adalah ruang terbuka yang cukup luas berada tepat di depan istana. Alun-alun adalah ruang pamer kekuasaan raja yang termanifestasi dalam bentuk upacara-upacara besar. Defile simbol-simbol kekuasaan raja dalam

bentuk *gunungan* yang melambangkan kesejahteraan negara dan parade angkatan bersenjata disertai pusaka-pusaka kraton menjadi acara dominan. Seperti halnya semua ruang di seantero negeri, alun-alun pun dianggap sebagai halaman luar rumah sang raja, sehingga hanya raja yang berwenang menggunakannya. Rakyat tidak bisa menggunakan alun-alun sesuka hati, karena alun-alun bukanlah ajang dialog tempat bersemainya bibit-bibit *equality of opportunity*. Bahkan gerakan *tapa pepe* bukanlah manifestasi adanya ruang publik dan demokrasi. *Tapa pepe* adalah usaha terakhir di mana rakyat sudah tak tahan lagi menghadapi penindasan yang sangat berat.

Tapa pepe adalah suatu kejadian dimana sekelompok orang duduk bersila di alun-alun sembari menjemur diri di bawah terik matahari untuk melaporkan suatu ketidakadilan dan penindasan yang mereka alami kepada raja, atau setidaknya mereka mencoba untuk menarik perhatian raja. Mereka tidak akan beranjak dari tempat mereka duduk bersila hingga raja melihat dan memanggil perwakilan dari mereka untuk bicara.

Melakukan *tapa pepe* adalah meresikokan nyawa sendiri. Oleh karena raja bisa saja tidak berkenan dan mereka justru dihukum mati.

Memilih untuk melakukan *tapa pepe* adalah sebuah pilihan semu, karena perjudian nasib ini adalah usaha terakhir. Bila mereka tidak melakukan hal itu, mereka tetap akan menghadapi kematian karena ketidakadilan dan penindasan yang sedang mereka alami. Oleh karenanya dari pada tidak melakukan apapun dan ditindas sampai mati, lebih baik melakukan *tapa pepe* meskipun beresiko bila raja tak berkenan, maka mereka bisa saja dihukum mati.

Sampai pada titik ini, dialog antara raja dan rakyat bisa dianggap tidak pernah terjadi, karena keputusan tetap di tangan raja dan ia tidak perlu mendengarkan rakyat yang memprotes dan mengajukan keberatan.

2. Sultan Agung: Model Penguasa Jawa

Kekuasaan raja dalam kerajaan Jawa, terutama di masa keemasan Mataram Islam dipertahankan oleh Sultan Agung melalui tiga cara. Cara pertama, yaitu pembentukan polisi negara yang langsung berada di bawah komando Sultan Agung. Selama pemerintahannya, Sultan Agung memerintahkan dibentuknya polisi negara sebanyak empat ribu personil dan mereka berada di bawah kendali empat hakim militer yang berkedudukan di kotaraja.

Polisi negara ini menjelajah seluruh negeri secara berkelompok bagaikan anjing pemburu untuk memata-matai seluruh aspek kehidupan para penguasa daerah, bahkan yang terbesar sekalipun. Mereka berhak menyidik tersangka dan para saksi, menuntut terdakwa, menjatuhkan vonis, sekaligus melakukan eksekusi.

Kekuasaan absolut Sultan Agung sebagai cerminan kekuasaan raja Jawa tergambar dengan jelas dalam tulisan H.J. De Graaf (1986), yang menceritakan bahwa Sultan Agung pernah memerintahkan seorang pejabat tinggi kerajaan yang dianggap berkhianat untuk dieksekusi di tengah pasar kotaraja. Si pejabat ini dihukum dengan diikat pada sebuah tiang di tengah-tengah pasar, kemudian algojo merobek perut si pejabat menggunakan keris yang beracun. Dalam keadaan sekarat ini, seluruh isi perut si pejabat dikeluarkan untuk dipertontonkan kepada khalayak. Berikutnya si pejabat ditinggalkan begitu saja hingga menemui ajalnya.

Cara kedua, yaitu melalui perkawinan politik yang piawai antara para penakluk dengan yang ditaklukkan. Sedangkan cara ketiga, adalah para penguasa daerah (vassal) diharuskan tinggal di Kotaraja selama beberapa bulan dalam setahun, dan apabila mereka harus kembali ke

daerah asalnya, mereka harus meninggalkan setidaknya satu anggota keluarga inti sebagai jaminan loyalitas mereka. Konsekuensi dari cara ini adalah tidak dimungkinkan adanya bangsawan penguasa daerah yang benar-benar otonom.

Aristokrasi dalam kerajaan Jawa walaupun beranggotakan kerabat dekat atau orang kepercayaan raja, namun mereka tidak berhak mengambil keputusan. Sistem birokrasi yang dikembangkan pun lebih mengacu pada sistem kemiliteran, dimana para penguasa daerah ditunjuk dan ditempatkan bukan berdasar pada wilayah, namun berdasar pada kuantitas individu manusia tinggal dalam wilayah itu. Penguasa daerah yang loyalitasnya baik akan menerima tanah yang luas sebagai konsekuensi kesetiaannya. Namun raja tetap mengendalikan wilayah tersebut secara ekonomis dengan cara menuntut si penguasa daerah menyetor hasil panen dan pajak. Raja memutuskan jenis panen apa saja dan berapa banyak yang harus disetor ke kotaraja. Secara politis, raja mengendalikan wilayah tersebut dengan cara memutuskan berapa banyak prajurit yang harus diserahkan si penguasa daerah ketika raja memaklumkan perang pada raja lain.

Sejarah akhirnya mencatat bahwa kekuasaan raja Mataram sepeninggal Sultan Agung justru semakin melemah. Penyebab pertama adalah kekalahan raja-raja penerus Sultan Agung dalam melawan pemberontakan-pemberontakan para vassalnya sendiri. Pemberontakan Trunojoyo, Untung Suropati, kerusuhan Cina sepanjang pesisir utara Jawa dan disusul dengan perang suksesi antar para keturunan Sultan Agung membuat negara terpuruk di semua bidang. Hal ini menyebabkan redupnya sinar kekuasaan raja yang seharusnya bisa terus menerus dipancarkan hingga ke pelosok-pelosok desa.

Penyebab kedua adalah terpaksa diserahkannya wilayah-wilayah strategis milik raja kepada VOC untuk membayar ongkos perang suksesi. Wilayah-wilayah yang jatuh ke tangan VOC akhirnya diprivatisasi dan dikelola melalui sistem birokrasi campuran antara VOC dan para penguasa daerah. Raja tak lagi memiliki kedaulatan atas wilayah-wilayah ini, sehingga ia dianggap semakin kehilangan kekuatan kosmos yang dimilikinya.

3. Budaya Jawa dalam Pancasila

Sebelum kemerdekaan RI tepatnya tanggal 1 Juni 1945 presiden Soekarno menjawab pertanyaan penting yang diajukan oleh Ketua

Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUKI) yaitu Dr. Radjiman Widyodiningrat mengenai dasar Negara yang akan menjadi falsafah. Muhammad Hatta yang juga mempelopori kemerdekaan Indonesia namun beliau lebih menyerahkan pembuatan ideologi sebagai dasar Negara kepada Ir Soekarno, hal ini di maksudkan memang yang lebih ahli dalam filsafat adalah Soekarno.

Pancasila sebagai galian bumi (sejarah dan bumi) budaya Indonesia diusulkan sebagai dasar Negara. Pancasila dimaksudkan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu mental baik dari zaman colonial belanda maupun dari zaman militerisme Jepang. Pancasila berwatak dan berfungsi sebagai dekolonsasi mental spiritual untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekuatan mutlak guna mematahkan belenggu fisik kolonial. Berikut 5 butir Pancasila:

- a. Ketuhanan yang maha Esa.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Persatuan Indonesia.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun pandangan lain di luar deskripsi Pancasila secara politis, Soekarno terinspirasi filsafah Jawa. Menurut sebagian dari faham ajaran spiritual Budaya Jawa, Pancasila itu merupakan bagian dari Wahyu Sapta Warsita Panca Pancataning Mulya (Wahyu tujuh kelompok ajaran yang masing-masing kelompok berisi lima butir ajaran untuk mencapai kemuliaan, ketenteraman, dan kesejahteraan kehidupan alam semesta hingga alam keabadian atau akhirat).

Sementara itu ada tokoh spiritual lain menyebutkan Panca Mukti Muni Wacana yang hanya terdiri atas lima kelompok. Berikut lima butir itu:

- a. Hambeg Manembah
Yakni sikap ketakwaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha esa. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya wajib memiliki rasa *rumangsa lan pangrasa* (menyadari) bahwa keberadaannya di dunia ini sebagai hamba ciptaan Ilahi, yang mengemban tugas untuk selalu mengabdikan hanya kepadaNya. Dengan pengabdian yang hanya kepadaNya itu, manusia wajib melaksanakan tugas amanah yang diemban, yaitu menjadi khalifah pembangun peradaban serta tatanan

kehidupan di alam semesta ini, agar kehidupan umat manusia, makhluk hidup serta alam sekitarnya dapat tenteram, sejahtera, damai, aman sentosa, sehingga dapat menjadi wahana mencapai kebahagiaan abadi di alam kelanggengan (akhirat) kelak (*Memayu hayu harjaning Bawana, Memayu hayu harjaning Jagad Traya, Nggayuh kasampurnaning hurip hing Alam Langgeng*) Dengan sikap ketakwaan ini, semua manusia akan merasa sama, yaitu berorientasi serta merujukkan semua gerak langkah, serta sepak terjangnya, demi mencapai ridlo Ilahi, Tuhan Yang Maha Bijaksana (Hyang Suksma Kawekas). Hambeg Mangeran ini mendasari pembangunan watak, perilaku, serta akhlak manusia. Sedangkan akhlak manusia akan menentukan kualitas hidup dan kehidupan, pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

b. Hambeg Manunggal

Manusia yang *hambeg mangeran* akan menyadari bahwa manusia itu terlahir di alam dunia ini pada hakekatnya sama. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh setiap insan itu memang merupakan tanda-tanda kebesaran Hyang Suksma Adi

Luwih (Tuhan Yang Maha Luhur). Oleh karena itu sebagai salah satu bentuk dari sikap ketakwaan seseorang adalah sikap hasrat serta kemauan kerasnya untuk bersatu. Perbedaan tingkatan sosial, tingkat kecerdasan, dan perbedaan-perbedaan lain sebenarnya bukan alat untuk saling berpecah belah, tetapi malah harus dapat dipersatukan dalam komposisi kehidupan yang serasi serta bersinergi.

Hanya ketakwaanlah yang mampu menjadi pendorong tumbuhnya hambeg manunggal ini, karena manusia akan merasa memiliki satu tujuan hidup, satu orientasi hidup, dan satu visi di dalam kehidupannya. Di dalam salah satu ajaran spiritual, *hambeg manunggal* itu dinyatakan sebagai, *manunggaling kawula lan gustine* (bersatunya antara rakyat dengan pemimpin), *manunggale jagad gedhe lan jagad cilik* (bersatunya jagad besar dengan jagad kecil), *manunggale manungsa lan alame* (bersatunya manusia dengan alam sekitarnya), *manunggale dhiri lan bebrayan* (bersatunya individu dengan masyarakat luas), *manunggaling sapatdha-padha*

(persatuan di antara sesama), dan sebagainya.

c. Hambeg Welas Asih

Yakni adalah sikap kasih sayang. Manusia yang hambeg mangeran, akan merasa dhirinya dengan sesama manusia memiliki kesamaan hakikat di dalam hidup. Dengan kesadaran itu, setelah hambeg manunggal, manusia wajib memiliki rasa welas asih atau kasih sayang di antara sesamanya. Sikap kasih sayang itu akan mampu semakin mempererat persatuan dan kesatuan.

d. Hambeg Wisata

Yakni sikap tenteram dan mantap. Karena ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, manusia akan bersikap tenteram dan merasa mantap di dalam kehidupannya. Sikap ini tumbuh karena keyakinannya bahwa semua kejadian ini merupakan kehendak Sang Pencipta. Hambeg wisata bukan berarti pasrah menyerah tanpa usaha, tetapi justru karena kesadaran bahwa semua kejadian di alam semesta ini terjadi karena kehendakNya, sedangkan Tuhan juga menghendaki manusia harus membangun tata kehidupan untuk mensejahterakan kehidupan alam semesta, maka dalam

rangka hambeg wisata itu manusia juga merasa tenteram dan mantap dalam melakukan usaha, berkarya, dan upaya di dalam membangun kesejahteraan alam semesta. Manusia akan merasa mantap dan tenteram hidup berinteraksi dengan sesamanya, untuk saling membantu, bahu membahu, saling mengingatkan, saling mat sinamatan, di dalam kehidupan.

e. Hambeg Makarya Jaya Sasama

Yakni sikap kemauan keras berkarya, untuk mencapai kehidupan, kejayaan sesama manusia. Manusia wajib menyadari bahwa keberadaannya berasal dari asal yang sama, oleh karena itu manusia wajib berkarya bersama-sama menurut potensi yang ada pada dirinya masing-masing, sehingga membentuk sinergi yang luar biasa untuk menjapai kesejahteraan hidup bersama. Sikap hambeng makarya jaya sesama akan membangun rasa “tidak rela” jika masih ada sesama manusia yang hidup kekurangan atau kesengsaraan.

4. Budaya Jawa dalam Demokrasi Desa

Desa dan negara senantiasa penting dalam sejarah orang Jawa, karena kedua organisasi ini secara bersama mempengaruhi pola politik, sosial

dan ekonomi seluruh kerajaan. Desa dalam sejarah kerajaan Mataram memang sangat penting, mengingat dinasti Mataram sering disebut sebagai dinasti petani yang berasal dari desa. Trunojoyo, setelah berhasil mengusir Susuhunan Amangkurat II dari kraton Kartasura menyatakan:

“Ratu Mataram iku dakumpamakake tebu, pucuke manch yen legiya, senjata bongkote ya adhem bae, sebab raja trahing wong tetanen, anggur macula bae bari angon sapi”

“Raja Mataram itu kuumpamakan tebu, ujungnya pun tak manis, begitu juga pangkalnya, sebab ia raja keturunan petani, lebih baik mencangkul saja sambil menggembalakan sapi” (G. Moedjanto, 1987)

Desa sebagai kesatuan politik terkecil menjadi tolok ukur tingkat kesuksesan seorang raja dalam memerintah. Namun, karena konsep kekuasaan raja memang absolut, homogen, masif dan terpusat, desa akhirnya menjadi semacam sapi perahan. Negara (atau lebih tepatnya raja) menguasai seluruh tanah desa, dan petani (yang semuanya) penggarap hanya diupah sesuai panen yang dia dapatkan.

Para lurah desa mengumpulkan pajak berupa hasil panen dan menyetorkannya kepada bupati. Selain itu, sebagai sebuah barak prajurit mandiri, apabila diperlukan akan diadakan

mobilisasi umum untuk menyetor prajurit ke medan laga demi kepentingan raja. Hubungan negara dan desa memang bersifat patron-klien, di mana negara menjadi pelindung desa (Wahono, 2001). Makna perlindungan di sini lebih bersifat negatif, senada dengan istilah premanisme. Premanisme negara ini akan kuat apabila posisi kekuasaan raja juga kuat.

Tersebarnya kekuasaan berkat jasa VOC melalui kebijakan privatisasi agraria, bersamaan dengan melemahnya kekuasaan raja bukan berarti bahwa kekuasaan berpindah ke tangan rakyat. Seiring melemahnya kekuasaan raja, premanisme negara berubah menjadi premanisme penguasa daerah dan pimpinan lokal. Penguasa daerah yang mulai lepas dari tekanan pemerintah pusat berubah menjadi raja-raja kecil.

Bersamaan dengan itu muncul pemimpin-pemimpin lokal-informal yang mulai berkuasa atas daerah-daerah tertentu. Kyai dan *gentho* mulai bermunculan dan berebut pengaruh politik, sosial dan ekonomi di tengah rakyat pedesaan Jawa. *Gentho* adalah predikat negatif bagi seseorang yang dianggap mampu menguasai kekuatan kosmos dalam pengertian kekuatan untuk memaksa orang lain memenuhi dan mematuhi kehendaknya dengan paksaan atau kekerasan. *Gentho* sama artinya dengan preman.

Meski mirip dengan fenomena Yakuza dan Triad, namun bedanya gentho melakukan kegiatan kriminal berupa pemerasan, pembunuhan dan perampokan tidak secara berkelompok (Ina Slamet-Velsink: 2001).

Ruang publik semu di Jawa nampak pada alun-alun kabupaten dan balai desa pasca meredupnya kekuasaan raja-raja Mataram anak cucu Sultan Agung. Ruang publik semu adalah sebuah ruang di mana semua orang dapat menggunakan sesuka hati, asalkan tidak berdialog dengan semangat kebebasan dan persamaan hak. Balai desa berubah fungsi dari ajang pergelaran kekuasaan raja menjadi ajang kontestasi kekuasaan antara penguasa formal dan pemimpin informal.

Balai desa di bawah kuatnya hegemoni kekuasaan raja menjadi tempat disampaikannya perintah dari raja ke seluruh rakyat. Ketika hegemoni ini memudar, balai desa menjadi wilayah yang hanya dapat dimanfaatkan atas ijin para aparat desa dan pemimpin lokal. Balai desa, makam desa, kantor lurah, masjid dan sekolah didirikan di atas tanah bengkok yang notabene pada awalnya adalah tanah milik raja yang dipinjamkan kepada lurah dan aparatnya sebagai ganti upah. Tanah bengkok biasanya sangat luas dan atau terpecah-pecah dalam beberapa

kawasan dalam suatu desa. Oleh karena luas dan terpecah-pecah, maka dimungkinkan didirikannya makam desa yang jaraknya terpisah cukup jauh dari kantor kelurahan, sekolah, dan masjid. Sementara balai desa biasanya dibuat menyatu dalam satu lokasi yang sama dengan kantor lurah, atau setidaknya jarak antara balai desa dan kantor lurah berdekatan. Tentu saja balai desa yang didirikan di atas tanah bengkok juga salah satu lokus yang dikendalikan oleh lurah.

Dialog antara rakyat dan aparat desa tetap saja tidak terjadi. Kritik dapat dilayangkan, namun dialog yang meluas tidak pernah terjadi, karena hanya para pemimpin lokal (gentho, kyai desa dan sesepuh desa) saja yang bisa mengajukan kritik dan dianggap mampu menyuarakan pendapatnya. Sementara pembahasan dan diskusi untuk menanggapi kritik tidak berlangsung hingga tuntas. Diskursus yang muncul dalam balai desa tetap saja menyangkut kekuasaan, dimana para penentang kekuasaan lurah mempertanyakan legitimasi menggunakan kekuatan oposisi untuk menjatuhkan lurah, dibanding melakukan kritik untuk menuju ke suatu pemahaman yang lebih bersifat konsensus dan kompromis. Balai desa memang tidak menjadi milik seluruh desa,

sehingga berpikir bahwa balai desa adalah sebuah lokus yang netral adalah mustahil.

D. Bahan Bacaan

- Breman, Jan. (1986) *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial*, LP3ES.
- De Graaf, H.J. (1986), *Puncak Kekuasaan Mataram* (terj), P.T. Pustaka Grafiti Pers, Jakarta.
- Francis Wahono, (2007) “Bersekongkol atau Saling Kontrol?”, *Hegemoni Negara: Ekonomi Politik Pedesaan Jawa*, Duto Sosialismanto, Laperu Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Fransisko Budi Hardiman, (2003). *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*, Penerbit Buku Baik, Yogyakarta.
- Franz Magnis Suseno S.J., (1984) *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, PT. Gramedia, Jakarta.
- G. Moedjanto (2001) “Pengantar” , *Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter* (terj), Hans Antlov dan Sven Cederroth (ed), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- G. Moedjanto, (1987), *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram*, Kanisius, Yogyakarta.
- Gunawan, Markus. 2008. *Buku pintar calon anggota dan anggota legislatif, DPR, DPRD dan DPD*. Tangerang: Visimedia.

- Hidayatullah, (2011) Buku Ajar Pendidikan Kewarga
Negaraan Bagi Tenaga Akademik universitas
Hasanuddin, Makasar.
- Ina Slamet-Velsink, (2001) “Kepemimpinan Tradisional
di Pedesaan Jawa” dalam *Kepemimpinan Jawa:
Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter* (terj), Hans
Antlov dan Sven Cederroth (ed), Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta.
- Lombard, Denys. (1996). *Nusa Jawa: Silang Budaya* jilid 3
(terj), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mark N. Hagopian, 1978, *Regimes, Movements, and Ideologies:
A Comparative Introduction to Political Science*, (New
York and London : Longman)
- Miriam Budiardjo, 1978, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,
(Jakarta: Gramedia).
- Miriam Budiardjo, (2010) *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi
revisi, Gramedia Pustaka Utama, cet. IV, Jakarta.
- Mochtar Lubis, (1987) *Politik Etis dan Revolusi
Kemerdekaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mulder, Niels. (2001) *Individual and Society in Java*, Gadjah
Mada University Press, Yogyakarta.
- Mulder, Niels. (2005). *Mysticism in Java: Ideology in
Indonesia*. Yogyakarta . Kanisius.
- Rachmat Susatyo, (2008) “Seni dan Budaya Politik
Jawa”, Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial.

- Reza A.A. Wattimena, (2007) *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sartono Kartodirdjo, (2001) “Berkembang dan Runtuhnya Aristokrasi Tradisional Jawa” dalam *Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter* (terj), Hans Antlov dan Sven Cederroth (ed), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- St. Benn and R.s Peters. (1964). *Principels of political thought* (Newyork : Collier Books).
- Sultani. (2015). *Konsolidasi Demokrasi Jawa Tengah: Kemandekan Orientasi Partai nasionalis*.

